

# Accountability Brief

**Pengarah:**  
Inosentius Samsul  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)  
**Tim Penulis:**  
Djustiawan Widjaya  
Hafiz Dwi Putra  
Cika Vanny

## Mewujudkan SDM Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan

### Isu Strategis

Saat ini, Indonesia tengah berada dalam masa bonus demografi yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk dengan usia produktif lebih tinggi jika dibandingkan penduduk dengan usia non produktif. Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki 191,08 juta atau 70,72% orang dengan usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2020. BPS memperkirakan bahwa bonus demografi akan mencapai puncaknya pada periode 2020-2035 di Indonesia.

Sebagai negara keempat dengan populasi penduduk terbesar di dunia, bonus demografi tersebut tentu dapat menjadi peluang yang berguna sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) produktif dalam jumlah yang besar, diantaranya berupa jumlah tenaga kerja yang merupakan motor penggerak dalam pembangunan. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perubahan dunia yang tengah memasuki era revolusi industri 4.0, maka persaingan global akan semakin ketat dan masa depan menjadi penuh tantangan. Oleh karena itu, diperlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu beradaptasi dengan perkembangan, karena hal tersebut merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan dalam pemanfaatan bonus demografi tersebut.

Namun, data dari beberapa sumber menunjukkan bahwa daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih terbilang cukup rendah dan tertinggal dari beberapa negara di kawasan ASEAN. Diketahui peringkat daya saing Indonesia yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum* (WEF) di dalam *Global Competitiveness Report* menunjukkan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat 45 dari 140 negara di dunia pada Tahun 2018. Sedangkan di Tahun 2019, peringkat daya saing Indonesia menurun 5 peringkat, yaitu menempati peringkat 50 dari 141 negara di dunia dan masih berada di bawah Singapura, Malaysia serta Thailand. Selain itu, *Asian Productivity Organization* (APO) *Productivity Databook:2021* juga mengungkap bahwa produktivitas pekerja Indonesia jika dilihat dari nominal gaji, masih berada di peringkat keempat dari beberapa negara ASEAN yang tergabung dalam APO dan masih berada di bawah Singapura, Malaysia, serta Thailand.

2022

Komisi IX

Tertinggalnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja Indonesia tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang ada, sehingga kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif dan adaptif serta dapat merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja dan industri belum dapat dipenuhi. Oleh karenanya, upaya untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Indonesia perlu untuk segera dilakukan.

Maka untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia, Pemerintah melalui Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 telah mencanangkan peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas nasional (PN 3), yang akan diuraikan ke dalam tujuh program prioritas. Selanjutnya untuk mewujudkan PN 3 tersebut, diantaranya telah dilakukan penetapan kegiatan prioritas yaitu penyelenggaraan “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri” melalui “Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0” yang merupakan salah satu dari 41 *Major Project* (MP)/Proyek Prioritas Strategis dalam RPJMN 2020-2024.

Pendidikan dan pelatihan vokasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, baik dalam penguasaan teknologi maupun penyesuaian akan berbagai perubahan pembagian dan cara kerja yang dinamis. Selain itu, lulusan juga dituntut untuk memiliki pengetahuan & keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini (*link and match*).

## Permasalahan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merupakan salah satu pelaksana dari *major project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Kemnaker menyelenggarakan pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan tinggi program diploma yaitu pada Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) yang bertujuan untuk menyiapkan para mahasiswa agar memiliki keahlian pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Selain itu, Kemnaker juga menyelenggarakan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau juga disebut Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja yang berada dibawah dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kerja sendiri diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelas yaitu Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Balai Latihan Kerja (BLK) Kelas I dan Kelas II.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama Industri dan Dunia Kerja (IDUKA) dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing TA 2020 dan Semester I TA 2021 pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap adanya beberapa permasalahan signifikan pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, diantaranya sebagai berikut:

### Pendidikan Vokasi

Diketahui Kemnaker belum optimal dalam menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di Polteknaker. Hal tersebut terlihat dari Dosen Tetap pada Polteknaker belum memenuhi standar yang sesuai dengan Permendikbud No.3/2020 yaitu 60% dari seluruh dosen. Adapun rasio perbandingan antara Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap yaitu 54,91% : 45,09% dari jumlah dosen sebanyak 51 orang.

Kemudian, seluruh Dosen Tetap yang ada (28 Dosen Tetap) belum memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi dosen) yang menjadi bukti formal sebagai tenaga profesional dengan kompetensi keahlian pendidik. Selain itu, Kualifikasi Akademik Dosen Tetap per program studi juga masih belum tercapai dan sesuai Standar Mutu Dosen (minimal 50% Dosen Tetap berijazah Doktor (S3)), karena jumlah dosen dengan kualifikasi akademik S3 hanya sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 27 orang, dan yang sedang mengikuti studi doktoral hanya 4 orang. Kemnaker juga belum sepenuhnya melakukan penguatan sertifikasi kompetensi pendidik

karena dari 28 Dosen Tetap diketahui terdapat dua orang dosen tidak mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi berupa pelatihan dan sembilan orang dosen belum memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai bidang ajarnya. Disamping permasalahan terkait kurang optimalnya peningkatan kualitas para dosen Polteknaker, diketahui Polteknaker juga belum memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) tersendiri untuk melakukan uji kompetensi bagi para mahasiswanya. Hal itu membuat Polteknaker bergantung kepada LSP Pihak Ketiga untuk melakukan uji kompetensi terhadap mahasiswanya

Permasalahan lainnya diketahui Kemnaker belum optimal dalam melakukan revitalisasi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) praktik kerja pendidikan vokasi di Polteknaker sesuai standar karena laboratorium untuk melaksanakan praktik pendidikan digunakan secara bersama-sama untuk menyimpan alat-alat dan bahan praktik serta melaksanakan praktik pembelajaran untuk keseluruhan program studi. Polteknaker juga diketahui belum memiliki sarpras yang memadai terkait dengan pelaksanaan praktik pada materi-materi antara lain bekerja dalam air, bekerja pada ketinggian, bekerja pada ruang terbatas, dan praktik kebakaran.

### **Pelatihan Vokasi**

Terkait dengan penyelenggaraan pelatihan vokasi oleh Kemnaker, BPK mengungkap permasalahan terkait upaya peningkatan mutu BLK yaitu Kemnaker belum optimal dalam melakukan revitalisasi dan meningkatkan kualitas sarpras praktik kerja pelatihan vokasi di BLK sesuai dengan standar. Hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan terkait sarpras BLK yang belum memadai karena Permenaker No. 8/2017 tentang standar BLK hanya mengatur untuk delapan dari 49 program pelatihan untuk kejuruan Otomotif dan empat program dari 27 pelatihan untuk kejuruan Manufaktur. Selain itu, pemeriksaan pada BBPLK Bandung ditemukan adanya pengadaan pada tahun 2017 berupa satu alat praktik pada kejuruan Teknik Manufaktur yaitu mesin *injection plastic molding* yang sampai dengan November 2021 belum digunakan untuk pelatihan dan program pelatihan untuk menggunakan alat tersebut juga belum disusun. Namun di sisi lain, terdapat kebutuhan sarpras pelatihan yang pengadaannya akan membantu pelaksanaan pelatihan namun belum tersedia pada beberapa BLK diantaranya pembaruan mesin bubut CNC pada BLK Surakarta, printer 3D pada BLK Makassar, dan sarana pelatihan untuk motor listrik pada BBPLK Bandung.

Proses pelatihan kerja tidak akan berhasil tanpa peran instruktur, namun terdapat permasalahan terkait dengan pemenuhan jumlah instruktur, diketahui per Tahun 2021 terdapat 11 Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker yang tidak memenuhi standar jumlah instruktur BLK yaitu minimal terdapat 2 (dua) Instruktur untuk 1 (satu) kejuruan. Kemnaker juga belum melakukan sebaran kuantitas dan penugasan Instruktur BLK UPTP Kemnaker secara memadai berdasarkan kejuruan yang dibutuhkan oleh BLK karena hampir di seluruh BLK UPTP Kemnaker terdapat Instruktur yang bidang ajar/kejuruannya tidak ada di UPTP tersebut. Selain itu, Kemnaker memberikan kesempatan untuk mengakomodasi Instruktur untuk bertugas di luar dari wilayah kerja penempatannya di BLK UPTP Kemnaker, tanpa batas waktu dan pertimbangan teknis terkait lainnya.

Kemudian, Kemnaker juga belum melakukan peningkatan kualitas Instruktur BLK UPTP Kemnaker secara memadai karena masih terdapat instruktur yang sertifikat kompetensinya sudah tidak berlaku, tidak mendapatkan pelatihan setiap tahun/secara berkala. Diketahui dari 238 instruktur yang ada di BBPLK Bandung, BLK Surakarta, dan BLK Makassar yang dijadikan uji petik pemeriksaan, terdapat 96 instruktur yang tidak mengikuti pelatihan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 42 instruktur tidak memiliki sertifikat kompetensi teknis sesuai bidang ajarnya, dan 56 orang instruktur memiliki sertifikat kompetensi yang sudah kedaluwarsa.

Selain permasalahan di atas, diketahui dari 21 UPT yang dimiliki, terdapat 3 (tiga) UPT Bidang Pelatihan Kerja belum membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yaitu BLK Sidoarjo, Belitung, dan BLK Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Belum adanya LSP

tersebut membuat para peserta pelatihan di BLK tersebut tidak dapat langsung mengikuti uji kompetensi (UJK) untuk memperoleh sertifikasi, bahkan beberapa peserta tidak mengikuti UJK. Selama tahun 2020 s.d. tahun 2021 diketahui terdapat peserta pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 194.534 peserta. Namun peserta yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) hanya sebanyak 60.160 peserta atau 30,93%.

### Permasalahan Lainnya

Tujuan akhir dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi diantaranya adalah untuk mempersiapkan peserta didik yang berkompoten dan siap untuk terjun ke industri kerja. Namun terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi oleh Kemnaker. Diketahui Kemnaker belum menyusun strategi penempatan lulusan pendidikan vokasi di Polteknaker. Penerimaan mahasiswa baru di Polteknaker hanya disusun berdasarkan kapasitas pendidikan dan keuangan yang dimiliki oleh Polteknaker dan bukan atas kebutuhan penempatan bagi calon lulusan. Selain itu, Kemnaker juga belum menyusun strategi penempatan lulusan pelatihan vokasi di BLK dan BBPLK diantaranya strategi penempatan atau pemberian pekerjaan bagi peserta pelatihan kerja dan pemantauan lulusan pelatihan kerja oleh Kemnaker belum memadai karena tidak didukung dengan data mutakhir mengenai kondisi dari masing-masing alumni pelatihan secara detail. Padahal pemutakhiran data peserta pelatihan yang telah selesai mengikuti pelatihan (alumni pelatihan) oleh masing-masing BLK/BBPLK akan bermanfaat bagi industri ketika memerlukan tenaga kerja dengan kriteria tertentu.

### Saran Perhatian

Beberapa permasalahan di atas yang diungkapkan oleh BPK merupakan permasalahan signifikan yang dinilai dapat menghambat efektivitas Kemnaker dalam menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerjasama IDUKA dalam rangka peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, BPK diantaranya merekomendasikan Kemnaker untuk:

1. Memperbaharui standar revitalisasi sarpras yang mengakomodir seluruh program pelatihan dan mekanisme pemenuhan sarpras serta melakukan inventarisasi kebutuhan sarpras BLK, termasuk pemanfaatan sarpras yang belum digunakan.
2. Menyusun strategi penempatan lulusan Polteknaker dan Pelatihan vokasi serta mekanisme pemantauan lulusannya.
3. Melakukan pemetaan terkait sebaran kejuruan yang ideal untuk Instruktur BLK UPTP Kemnaker dan pendataan yang terintegrasi.
4. Menyusun rencana peningkatan kompetensi untuk Instruktur BLK UPTP Kemnaker sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan Iduka.
5. Mensertifikasi semua tenaga instruktur dan peserta pelatihan di BLK.

Selain itu, Komisi IX DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan dapat mendorong Kemnaker untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dan terus memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi agar dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

### Referensi

APO. 2021. *Asian Productivity Organization (APO) Productivity Databook: 2021*. Japan.

BPK RI. 2022. *LHP Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I TA 2021 Pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Instansi Terkait Lainnya Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta.

World Economic Forum. 2018. *Global Competitiveness Report 2018*. Switzerland.